**ASPEK VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA SCAMMER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *NON-FUNGIBLE TOKEN***



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**FARKHAN YASID**

**NPM. 5119500124**

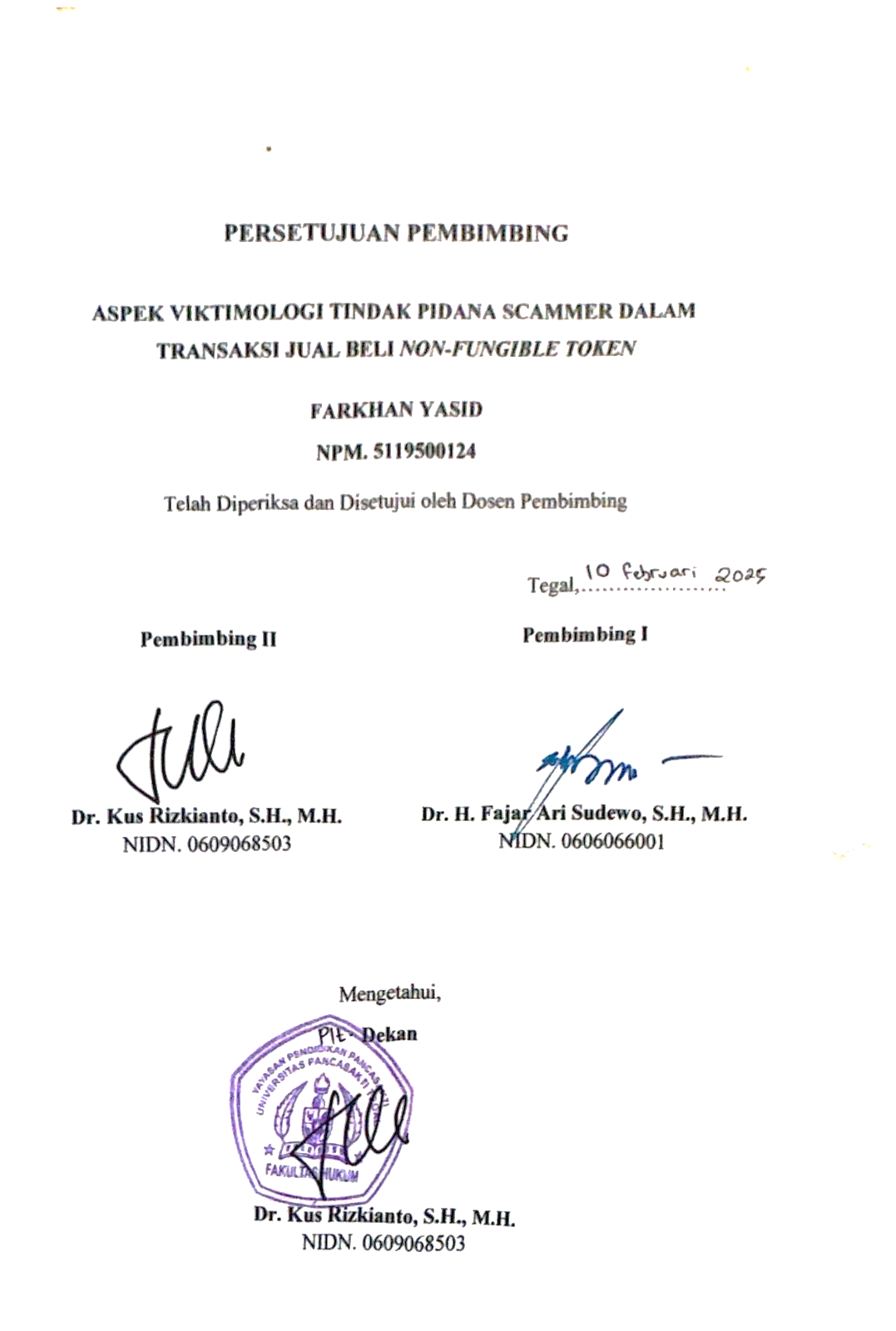
**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

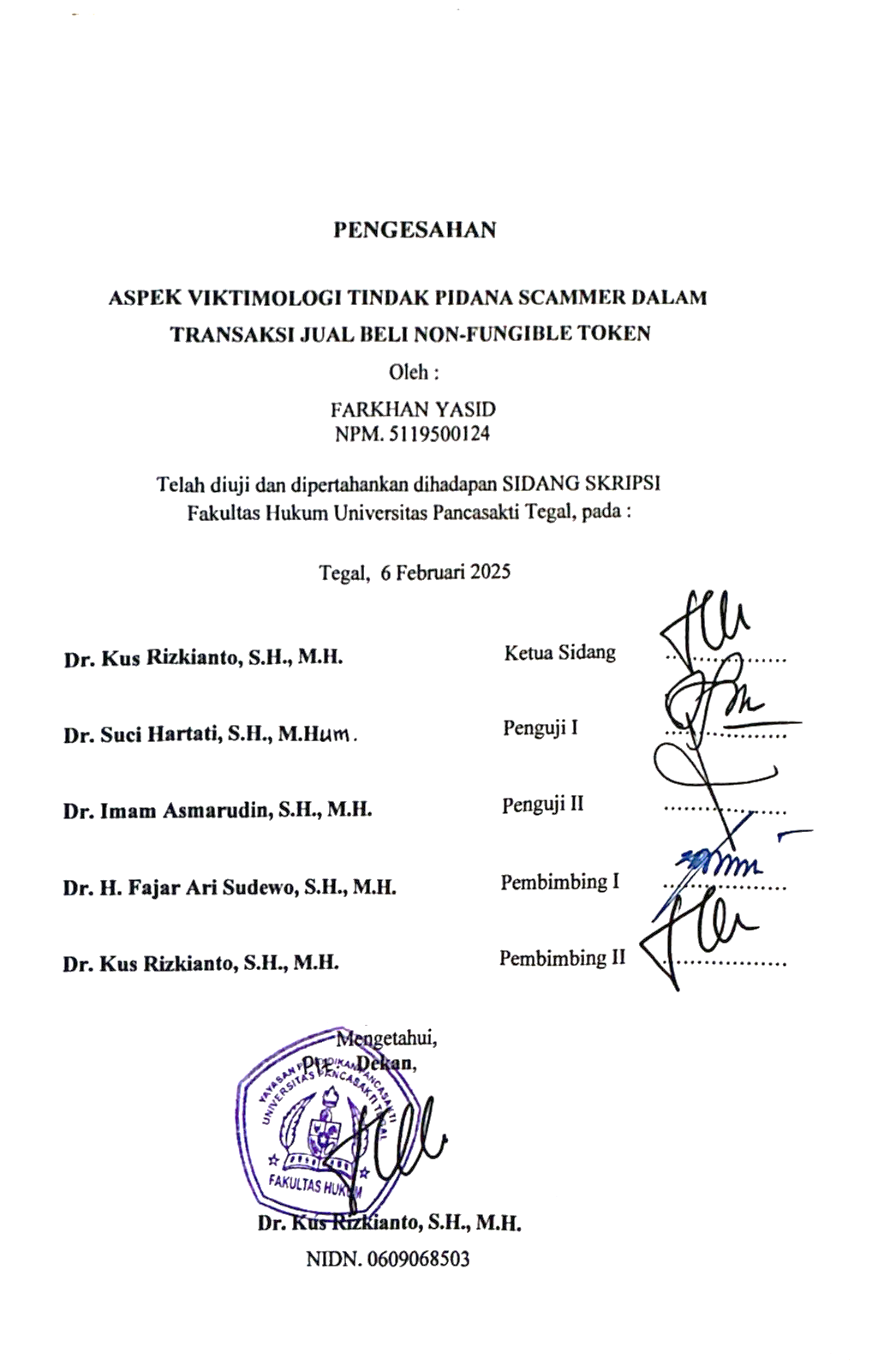
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

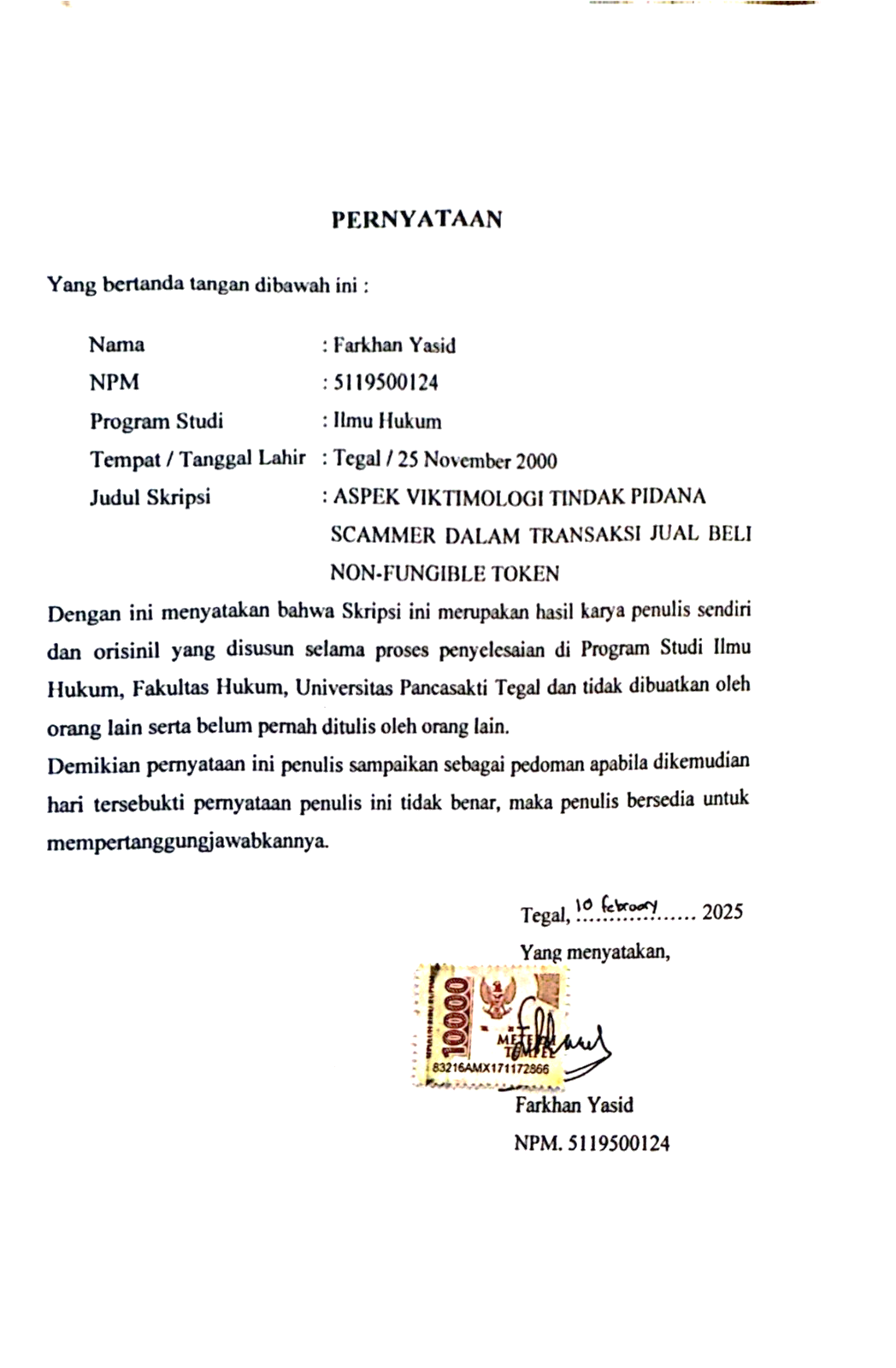
# PERSETUJUAN PEMBIMBING



# PENGESAHAN



# PERNYATAAN



# ABSTRAK

*Non Fungible Token* merupakan simbol dari masa depan pasar yang semakin modern dan rumit. NFT memberikan fasilitasi untuk monetisasi dan komersialisasi digital artdan memungkinkan digital artistuntuk memonetisasi karya mereka melalui proses yang lebih cepat, efektif dan efisien. Viktimologi sebagai sebuah ilmu memandang dan menganalisa perbuatan pidana yang terjadi dari unsur korban. Penempatan korban sebagai objek utama dari viktimologi tidaklah dimaknai viktimologi sekedar sebagai ilmu yang “melindungi” korban, tetapi juga termasuk melihat dan menganalisa apakah perbuatan pidana yang terjadi ada peranan korban sebagai unsur yang menentukan atau tidak. Peran viktimologi dalam tindak pidana scammer NFT sangat penting, viktimologi membantu untuk memahami karakteristik korban dan faktor yang membuat mereka rentan mengalami tindak pidana tersebut, seperti apakah mereka termasuk investor pemula yang kurang pengetahuan tentang teknologi *blockchain* atau mereka yang terlibat dalam tren investasi baru tanpa investigasi mendalam. Faktor-faktor seperti kurangnya literasi digital, kesulitan memahami teknologi baru, atau ketidakmampuan mengidentifikasi penipuan online sering kali membuat individu lebih rentan menjadi korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyelesaian hukum terhadap kasus tindak pidana scammer dalam transaksi *Non-Fungible Token* di Indonesia dan mengkaji aspek viktimologi terhadp tindak pidana scammer dalam transaksi *Non-Fungible Token di Indonesia*.

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan field research (penelitian lapangan). Metode pendekatan penelitian ini adalah sosiologis, yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku seorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder merupakan data penunjang.

Hasil penelitian ini proses penyelesaian hukum terhadap kasus tindak pidana scam NFT di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi, terutama disebabkan oleh sifat teknologi blockchain yang anonim dan transaksi yang irreversibel. Koordinasi antar berbagai otoritas hukum seperti Polri, Bappebti, OJK, dan pengadilan menjadi kunci utama dalam menangani kasus-kasus ini. Aspek viktimologi dalam tindak pidana scam NFT di Indonesia mengungkapkan bahwa korban sebagian besar adalah individu berusia dewasa muda hingga paruh baya dengan tingkat pendidikan tinggi dan minat yang besar terhadap investasi digital.

***Kata Kunci : Non-Fungible Token, Viktimologi, Blockchain***

# ***ABSTRACT***

*Non Fungible Token is a symbol of the future of the increasingly modern and complex market. NFTs provide facilitation for the monetization and commercialization of digital art and allow digital artists to monetize their work through a faster, more effective and efficient process. Victimology as a science views and analyzes criminal acts that occur from the victim element. The placement of the victim as the main object of victimology is not interpreted as a science that "protects" the victim, but also includes seeing and analyzing whether the criminal act that occurs has the role of the victim as a decisive element or not. The role of victimology in NFT scammer crimes is very important, victimology helps to understand the characteristics of victims and the factors that make them vulnerable to such crimes, such as whether they are among the novice investors who lack knowledge about blockchain technology or those who are involved in new investment trends without in-depth investigation. Factors such as a lack of digital literacy, difficulty understanding new technologies, or an inability to identify online fraud often make individuals more vulnerable to becoming victims.*

*This study aims to examine the legal settlement process for cases of scammer crimes in Non-Fungible Token transactions in Indonesia and to examine the victimological aspects of scammer crimes in Non-Fungible Token transactions in Indonesia.*

*The type of research that the author uses to analyze this research uses field research. The method of this research approach is sociological, which is a research procedure that describes the behavior of a person, event or certain place in detail and in depth related to legal norms that must be obeyed and implemented with the main data used in this study being primary data, while secondary data is supporting data.*

*The results of this study show that the legal settlement process for NFT scam cases in Indonesia shows high complexity, mainly due to the anonymous nature of blockchain technology and irreversible transactions. Coordination between various legal authorities such as the National Police, Bappebti, OJK, and the courts is the main key in handling these cases. The victimological aspect of NFT scams in Indonesia reveals that the victims are mostly young to middle-aged individuals with a high level of education and a strong interest in digital investments*.

***Keywords: Non-Fungible Token, Viktimology, Blockchain***

# PERSEMBAHAN

***Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*…**

Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah saya membuka persembahan ini dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Yang Maha Kuasa, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kemudahan. Saya Farkhan Yasid skripsi ini saya persembahkan untuk Orang Tua saya dan Kakak-Kakak saya yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya. Dan tidak lupa untuk Dosen Pembimbing tersabar yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala ilmu yang ada dalam skripsi ini dapat menjadi manfaat, baik di dunia maupun akhirat. Semoga Allah meridhai setiap langkah kita dalam mencari ilmu dan menjadikan amal kita sebagai pemberat timbangan kebaikan di Yaumul Akhir.

***Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh…***

# MOTTO

*Singkat saja, Hiduplah Seperti Laut ada masa tenangnya, ada masa kerasnya, jangan menyerah, Pahaam!! – Kak Gem -*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telahmelimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ASPEK VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA SCAMMER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NON-FUNGIBLE TOKEN”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
6. Kepada Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing IIyang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta sudah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan*.*
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.
8. Segenap Pegawai Administrasi / Perpustakaan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik
9. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, ……………….

Penulis,

Farkhan Yasid

NPM. 5119500124

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN PEMBIMBING i](#_Toc188923887)

[PENGESAHAN ii](#_Toc188923888)

[PERNYATAAN iii](#_Toc188923889)

[ABSTRAK iv](#_Toc188923890)

[*ABSTRACT* v](#_Toc188923891)

[PERSEMBAHAN vi](#_Toc188923892)

[MOTTO vii](#_Toc188923893)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc188923894)

[DAFTAR ISI x](#_Toc188923895)

[DAFTAR TABEL xiii](#_Toc188923896)

[DAFTAR GAMBAR xiv](#_Toc188923897)

[BAB I 1](#_Toc188923898)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc188923899)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc188923900)

[B. Rumusan Masalah 7](#_Toc188923901)

[C. Tujuan Penelitian 8](#_Toc188923902)

[D. Urgensi Penelitian 8](#_Toc188923903)

[E. Tinjauan Pustaka 9](#_Toc188923904)

[F. Metode Penelitian 12](#_Toc188923905)

[1. Jenis Penelitian 12](#_Toc188923906)

[2. Pendekatan Penelitian 13](#_Toc188923907)

[3. Sumber Data 13](#_Toc188923908)

[4. Metode Pengumpulan Data 15](#_Toc188923909)

[5. Metode Analisis Data 15](#_Toc188923910)

[G. Sistematika Penulisan Skripsi 16](#_Toc188923911)

[BAB II 18](#_Toc188923912)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 18](#_Toc188923913)

[A. Tinjauan Umum tentang Viktimologi 18](#_Toc188923914)

[1. Pengertian Viktimologi 18](#_Toc188923915)

[2. Ruang Lingkup Viktimologi 20](#_Toc188923916)

[3. Perkembangan Viktimologi 24](#_Toc188923917)

[B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 25](#_Toc188923918)

[1. Pengertian Tindak Pidana 25](#_Toc188923919)

[2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 29](#_Toc188923920)

[3. Ruang Lingkup Tindak Pidana 33](#_Toc188923921)

[C. Tinjauan Umum tentang Scammer 35](#_Toc188923922)

[1. Pengertian Scammer 35](#_Toc188923923)

[2. Ruang Lingkup Scammer 37](#_Toc188923924)

[D. Tinjauan Umum tentang Non-Fungible Token (NFT) 41](#_Toc188923925)

[1. Pengertian Non-Fungible Token (NFT) 41](#_Toc188923926)

[2. Ruang Lingkup Non-Fungible Token (NFT) 43](#_Toc188923927)

[BAB III 47](#_Toc188923928)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47](#_Toc188923929)

[A. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Scammer Dalam Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Di Indonesia 47](#_Toc188923930)

[1. Mencari Unsur-Unsur Tindak Pidana Scammer Dalam Transaksi NFT Berdasarkan Undang-Undang Yang Mengatur Penipuan Digital di Indonesia 51](#_Toc188923931)

[2. Kerjasama Otoritas dan Justice Collaborator Penanganan Kasus Scam NFT 59](#_Toc188923932)

[3. Penyelesaian Hukum Scam NFT di Indonesia 63](#_Toc188923933)

[B. Aspek Viktimologi Terhadp Tindak Pidana Scammer Dalam Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Di Indonesia 74](#_Toc188923934)

[BAB IV 89](#_Toc188923935)

[PENUTUP 89](#_Toc188923936)

[A. Kesimpulan 89](#_Toc188923937)

[B. Saran 90](#_Toc188923938)

[DAFTAR PUSTAKA 91](#_Toc188923939)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 100](#_Toc188923940)

# DAFTAR TABEL

[Table 1 – Relevansi Undang-Undang 51](#_Toc185854961)

[Table 2 – Relevansi Peraturan/Kebijakan 53](#_Toc185854962)

[Table 3 – Tantangan Penyelesaian Scam NFT 55](#_Toc185854963)

[Table 4 – Tanggungjawab Otoritas 61](#_Toc185854964)

[Table 5 – Putusan Kasus Scam dan Phisisng 64](#_Toc185854965)

[Table 6 – Demografis Korban Scam NFT 78](#_Toc185854966)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 1 – NFT Ghozali Everyday 77](#_Toc185854998)

[Gambar 2 – Market NFT 84](file:///G:\ARSIP%20NASKAH\Skripsi\Skripsi\Cloter%202025\FARKHAN%20YASID%20-%205119500219\Farkhan%20Yasid%20-%205119500219%20(FULL%20BAB).docx#_Toc185854999)

[Gambar 3 – Market NFT 84](file:///G:\ARSIP%20NASKAH\Skripsi\Skripsi\Cloter%202025\FARKHAN%20YASID%20-%205119500219\Farkhan%20Yasid%20-%205119500219%20(FULL%20BAB).docx#_Toc185855000)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

*c*. Popularitas NFT mendorong peningkatan signifikan pada monetisasinya. Pada pertengahan tahun 2021 volume transaksi NFT mengalami pertumbuhan eksponensial hingga menyentuh angka USD 2,5 Milyar.[[1]](#footnote-1) NFT merupakan token berbasis *blockchain* yang secara aman memetakan hak milik ke bentuk aset digital. NFT menyertakan tautan yang biasanya dalam bentuk URL ke konten digital yang tersedia di tempat lain secara *online*. Setiap token memiliki nilai jual unik yang tidak dapat sepenuhnya diganti dengan token yang berbeda. Dalam arti bahwa NFT membuat tautan ke suatu item, yang spesifikasinya biasanya juga disertakan dalam metadata. Produk NFT dapat berupa item yang berbeda-beda. NFT berbentuk seperti sebuah sertifikat digital untuk menunjukkan adanya kepemilikan atau kekuasaan terhadap produk digital yang dimiliki. Seperti namanya, salah satu fitur utama NFT adalah *non- fungible* yang berarti mereka unik secara individual, memiliki nilai jual yang berbeda dan tidak dapat ditukar. Berbeda dengan *cryptocurrency* seperti Bitcoin dan Ethereum. Walaupun *cryptocurrency* dan NFT dibangun dengan teknologi blockchain, *cryptocurrency* ataupun mata uang asli tergolong dapat

dapat ditukarkan atau *fungible*.[[2]](#footnote-2) Salah satu aspek yang membedakan NFT dalam transaksi digital adalah kemampuannya untuk memperdagangkan berbagai jenis karya seni, seperti gambar, lukisan, puisi, film, dan lainnya. Teknologi *blockchain* memungkinkan solusi terhadap masalah hak ekonomi dan moral dalam hal ini. Selain itu, NFT juga dapat digunakan untuk mengautentikasi barang digital, sehingga dapat mengurangi penipuan. Namun, NFT yang tersimpan di *blockchain* tidak dapat diwariskan, dan hanya pemilik NFT yang memiliki hak atas klaim barang digital tersebut.

Dunia telah sampai pada transformasi digital yang membawa perubahan besar dalam aktivitas, gaya hidup, bahkan proses kreatif dan perwujudan karya kreatif. Pada era ini, media digital menjadi *platform* preferen untuk menuangkan kreativitas karena kemudahan, efektivitas dan jangkauan yang luas. Pembentukan regulasi di bidang teknologi informasi pada hakekatnya bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada, namun pemanfaatan teknologi digital mengubah bagaimana masyarakat berinteraksi dengan karya cipta.[[3]](#footnote-3) Indonesia telah menggeser kedudukan Ukraina sebagai pemegang presentasi tertinggi terhadap *cybercrime*. Data tersebut berasal dari penelitian Verisgin, perusahaan yang memberikan pelayanan intelejen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat. Indonesia juga termasuk negara dengan jumlah kasus *cybercrime* yang tinggi. Indikasinya terlihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit, penipuan perbankan, judi *online*, terorisme, dan lain-lainnya.[[4]](#footnote-4) Kata *cyber* sendiri berasal dari kata *cybermatics*, merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan tentang mengatur atau mengarahkan sistem mulai dari yang sederhana hingga yang paling kompleks dengan cara memahami sistem melalui alat, cara dan metode.[[5]](#footnote-5)

Tindakan memanfaatkan komputer dengan cara yang melanggar hukum atau berbahaya termasuk dalam konsep kejahatan dunia maya. Dalam industri komputer, ini adalah cara paling umum yang disebut *illegal access*. Tindakan orang yang memasukkan penggunaan komputer sebagai instrumen untuk perilaku ilegal termasuk pornografi, pelanggaran kekayaan intelektual, dan jenis kejahatan konvensional lainnya yang menggunakan komputer. Contoh dari jenis kegiatan tersebut antara lain, seperti perjudian, pemalsuan, fitnah, dan pencurian identitas. Dapat dibayangkan untuk mengklasifikasikan tindakan *cybercrime* sebagai tindakan asli atau pelanggaran hukum, meskipun faktanya mereka terjadi di dunia maya. Karena melakukan hal itu akan menimbulkan banyak sekali komplikasi dan masalah yang berada di luar lingkup hukum, tidak ada lagi kebutuhan, dari perspektif yurisprudensi yang ketat, untuk mengklasifikasikan apa pun di dunia maya menurut dimensi dan kualifikasi hukum konvensional. agar dapat dianggap sebagai suatu objek atau perbuatan. Terlepas dari sifat elektronik dari teknologi yang menyertainya, tindakan *cybercrime* adalah aktivitas virtual yang mungkin memiliki implikasi dunia nyata. Selain itu, klaim harus mencirikan subjek klaim sebagai individu manusia kehidupan nyata yang telah terlibat dalam beberapa jenis aktivitas ilegal.[[6]](#footnote-6)

Bisnis maupun jasa secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku harga murah di pasaran membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut diduga banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Hal yang demikian disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, serta tindak pidana penipuan jenis ini masih dikatagorikan sebagai delik biasa.[[7]](#footnote-7) Seperti salah satu contohnya adalah *scammer* (penipuan) dalam transaksi jual beli *Non Fungible Token* (NFT) yang memerlukan penanggulangan yang serius karena banyak beredar di media elektronik. Kasus penipuan NFT *Beeple’s Everday: The First 5000 Days*. Ini terjadi pada bulan Maret tahun 2021, dimana muncul sebuah situs web palsu yang meluncurkan NFT *Beeple* palsu, Situs web ini menawarkan NFT palsu yang mengklaim sebagai salinan dari karya seni digital *Beeple* yang dijual seharga jutaan dollar, selain itu juga kasus *scam* *Sleepdrop* yaitu dengan mengelabui pengguna NFT dengan mengirimkan token palsu melalui *airdrop* dalam *wallet* penggunanya. Penanggulangan adalah sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh peroangan atau lembaga yang bertujuan untuk melahirkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat melalui usaha-usaha seperti pencegahan, pengamanan, pengusahaan ataupun pengendalian demi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan, upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upayaupaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).[[8]](#footnote-8)

Viktimologi sebagai sebuah ilmu memandang dan menganalisa perbuatan pidana yang terjadi dari unsur korban. Penempatan korban sebagai objek utama dari viktimologi tidaklah dimaknai viktimologi sekedar sebagai ilmu yang “melindungi” korban, tetapi juga termasuk melihat dan menganalisa apakah perbuatan pidana yang terjadi ada peranan korban sebagai unsur yang menentukan atau tidak.[[9]](#footnote-9) Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana *scammer* dalam transaksi jual beli *Non-Fungible Token* (NFT) melibatkan pemahaman tentang korban, pelaku, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan tindakan kejahatan tersebut. Dalam perspektif viktimologi bahwa viktimologi merupakan ilmu pengetahuan tentang korban dimana salah satu kajiannya adalah dengan mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya viktimisasi, diantaranya Pertama, korban memiliki perilaku kurang waspada (hati-hati).[[10]](#footnote-10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana scammer. Selama ini tindak pidana *scammer* atau penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana scammer atau penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*.”

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda.

Peran viktimologi dalam tindak pidana *scammer* NFT sangat penting, viktimologi membantu untuk memahami karakteristik korban dan faktor yang membuat mereka rentan mengalami tindak pidana tersebut, seperti apakah mereka termasuk investor pemula yang kurang pengetahuan tentang teknologi *blockchain* atau mereka yang terlibat dalam tren investasi baru tanpa investigasi mendalam. Faktor-faktor seperti kurangnya literasi digital, kesulitan memahami teknologi baru, atau ketidakmampuan mengidentifikasi penipuan *online* sering kali membuat individu lebih rentan menjadi korban. Dengan mendalami aspek psikologis dan sosial, bisa mengidentifikasi pola perilaku yang sering ditemui dikalangan korban. Kejahatan ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban, termasuk hilangnya aset digital atau uang yang digunakan untuk membeli NFT. Dari sudut pandang viktimologi, penting untuk melihat bagaimana korban dapat lebih terlindungi melalui edukasi digital dan penguatan regulasi terkait aset digital, sekaligus memastikan sistem hukum memberikan perlindungan dan ganti rugi yang memadai kepada mereka yang terdampak oleh tindak pidana scammer dalam transaksi jual beli *non-fungible token*.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap kasus tindak pidana scammer dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia?
2. Bagaimana aspek viktimologi terhadp tindak pidana *scammer* dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji proses penyelesaian hukum terhadap kasus tindak pidana scammer dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia.
2. Untuk mengkaji aspek viktimologi terhadp tindak pidana *scammer* dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia.

## Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai transaksi jual beli *Non-Fungible Token* (NFT) terdapat beberapa faktor yang menjadikan penelitian ini penting dan mempunyai urgensi adalah sebagai berikut:

* 1. Untuk pihak berwenang dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan pencegahan tindak pidana dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT).
  2. Dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena kejahatan dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT), yang dapat mengisi celah pengetahuan dalam bidang viktimologi dan kejahatan dalam bidag informasi dan transaksi elektronik.
  3. Dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis bagi peneliti dan akademisi dalam mengembangkan pengetahuan tentang viktimologi dan kejahatan daring dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT).

## Tinjauan Pustaka

Pengambilan penelitian dengan judul “Tinjauan Viktimologi Tindak Pidana Scammer Dalam Transaksi Jual Beli *Non-Fungible Token* (NFT)” mengkaji kembali dengan pengambilan persamaan dari tema dan objek penelitian dengan adanya perbedaan pada penelitian ini seperti pada penelitiaan berikut :

1. Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad dengan penelitiannya pada Jurnal Hukum Tora, Volume 9, Nomor 2, 2023 dengan judul penelitian “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia”.[[11]](#footnote-11) Penelitian Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad menjelaskan mengenai langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI dan KEMENDAG untuk menyempurnakan undang-undang mengenai aset kripto bisa dianggap bijak dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Penelitian ini juga memiliki peran penting sebagai alat untuk membantu pemerintah Indonesia menyempurnakan undang-undang yang ada, khususnya terkait aturan penggunaan aset kripto berbasis NFT (*token non-fungible*) dan SFT (*token semi-fungible*), baik untuk tujuan bisnis, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maupun investasi.

Berdasarkan penelitian Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad terdapat suatu persamaan pembahasan yaitu mengenai ekosistem perdagangan aset kripto yang berkualitas tinggi, pemerintah Indonesia perlu mengatur jenis teknologi rantai blok yang diperkenankan untuk diperdagangkan guna memastikan kepastian hukum yang terjamin dengan baik dari para pelaku tindak pidana dalam transaksi jual beli NFT.

1. Edwin Putraga dengan penelitiannya pada Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023 dengan judul penelitian “Modus Operandi Dan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Penipuan Berkedok Investasi Yang Dilakukan Melalui Aplikasi Online Di Polda DIY”.[[12]](#footnote-12) Penelitian Edwin Putraga menjelaskan mengenai Tindak pidana penipuan dengan berkedok investasi online merupakan tindak pidana yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, khususnya di Polda DIY sendiri beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan dengan total 11 Kasus. Tindak pidana penipuan berkedok investasi online memberikan kerugian yang besar bagi korbannya, Selain itu para pelaku kerap menggunakan modus skema baru dalam menjalankan aksinya, yang mana dalam penanganannya memiliki kesulitan tersendiri bagi pihak kepolisian. Kemudian perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian berupa Penyedia layanan informasi dan aduan, Bekerjasama dengan Penyedia Layanan, menjamin keamanan bagi korban, pengarahan terkait perlindungan dan pemulihan kerugian, memberikan kepastian hukum dengan menjerat pelaku berlandaskan pada Pasal 105 dan 106 UU Perdagangan, Pasal 28 Ayat (1) dan 35 UU ITE serta dapat dikenakan Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat suatu perbedaan pembahasan yaitu mengenai modus operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan berkedok investasi online, modus tersebut yaitu Modus Investasi Aset Kripto, Modus Investasi Robot Trading, Modus Joki Forex.

1. Arna Safitri dengan penelitiannya pada Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2022 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten NFT (*Non- Fungible Token*) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual”.[[13]](#footnote-13) Penelitian Arna Safitri menjelaskan bahwa perlindungan Hukum bagi pemilik konten NFT, Melihat bahwa mengkaji masalah Hak Cipta yang pada akhirnya akan bermuara kepada konsep hukum itu sendiri, terutama menyangkut upaya pelindungan terhadap hasil karya seni dua dimensi dalam bentuk *Non Fungible Token* (NFT). Kegiatan jual beli karya seni NFT dalam media digital membawa angin segar bagi para seniman, Namun hal ini juga menghadirkan permasalahan bagi beberapa pihak dalam melindugi karya ciptanya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan pencipta. bagi pemilik konten NFT (*Non-Fungible Token*) dalam sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat suatu perbedaan pembahasan yaitu Arna Safitri membahas pada perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta dari suatu karya, sebaiknya diberlakukan kebijakan yang memberikan batasan dalam proses transaksi NFT tersebut. Sedangkan peneliti dalam proses transaksi jual beli yang terdapat scammer.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan).[[14]](#footnote-14) Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian *field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan mengenai *Non Fungible Token* (NFT). Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah sosiologis, yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku seorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan. Pendekatan sosiologis yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan secara sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara.

### Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.[[15]](#footnote-15) Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder merupakan data penunjang. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan sebuah metode untuk menganalisis suatu persoalansosial secara individu tanpa menghubungkan atau mengkaitkan dengan persoalan lainnya.[[16]](#footnote-16)

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum dan membahas pokok-pokok studi ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, teks, jurnal, media cetak, dan media elektronik.[[17]](#footnote-17)

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.[[18]](#footnote-18) Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilaksanakan secara terbuka terhadap penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, akademisi dan perwakilan masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan penelusuran secara *offline* dan *online*. Penelusuran kepustakaan secara offline adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penelusuran secara *online* adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet.

### Metode Analisis Data

Analisis penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, menggunakan data yang telah disusun menjadi kalimat dan dilakukan secara sistematis, lugas, dan logis. berdasarkan konsep hukum, prinsip hukum, norma hukum, dan ketentuan hukum positif. Metodologi diskusi menyimpang dari pengetahuan umum sebelum mengevaluasi insiden khusus.[[19]](#footnote-19)

## Sistematika Penulisan Skripsi

**Bab I Pendahuluan**, pada awal bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian yang memberikan gambaran awal tentang yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Tinjauan Konseptual**, pada bab ini selanjutnya penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan pada penelitian ini meliputi Tinjauan Umum tentang Viktimologi, Tinjauam Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Scammer, Tinjauan Umum tentang *Non-Fungible Token* serta Tinjauam Umum tentang lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu tentang (1) Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap kasus tindak pidana scammer dalam transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia? (2) Bagaimana aspek viktimologi terhadp tindak pidana scammer dalam transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia?.

**Bab IV Penutup**, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan diuraikan secara deskriptif menjawab inti pada permasalahan pada penelitian ini.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum tentang Viktimologi

### Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbuan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[[20]](#footnote-20) Secara keseluruhan, viktimologi memiliki peran yang sangat penting dalam konteks hukum pidana dengan memberikan pandangan yang holistik dan kritis terhadap perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban kejahatan.[[21]](#footnote-21) Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban dan berusaha untuk memberikan sebab terjadinya viktimasi.[[22]](#footnote-22)

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli krimonologi yang mempelajari

kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut.[[23]](#footnote-23)

Korban bisa terlahir karena akibat dari sebuah kejahatan, pelanggaran HAM maupun dikarenakan terjadinya bencana alam. Akibat yang lahir, terutama dari sebuah tindakan kejahatan mengahasilkan korban baik langsung maupun tidak langsung, baik pelaku dan korbannya terdiri dari individu berbeda ataupun mempunyai karakter pelaku kejahatan dan sebagai korban secara bersamaan yang disebut Kejahatan Tanpa Korban.[[24]](#footnote-24) Dari sudut pandang vikimologi, korban diorientasikan hanya pada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari viktimologi.[[25]](#footnote-25)

Viktimologi sebagai suatu ilmu atau studi telah mengalami perkembagan hingga pada keadaan seperti sekarang yang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai macamperkembangan yang terdiri dari 3 fase yaitu:

1. Viktimologi hanya mempelajari korban saja.
2. Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan.
3. Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.[[26]](#footnote-26)

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dans sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.[[27]](#footnote-27)

### Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya bebagai kejahatan atau penimbulan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini. Antara lain: ingin dicegah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan atau viktimisasi (penimbulan korban) lain lebih lanjut antara yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, jelas viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat dapat merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia.[[28]](#footnote-28) Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :[[29]](#footnote-29)

1. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.
2. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup.
3. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.
4. Viktimisasi medical, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lainlain.
5. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:[[30]](#footnote-30)

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang

sebenarnya secara dimensional.

1. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi

antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

1. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Jan Van Dijk, seorang profesor viktimologi di Tilburg University, mengemukakan bahwa Saat ini ada dua jenis utama viktimologi, yaitu viktimologi umum dan viktimologi pidana. Perbedaan keduanya didasarkan pada definisi yang digunakan untuk mengidentifikasi korban. Viktimologi umum mempelajari tentang korban dalam arti luas, termasuk mereka yang menjadi korban bencana alam, perang, dan sebagainya. Fokus dari jenis viktimologi ini adalah pengobatan, pencegahan, dan penanganan bagi mereka yang menjadi korban, terlepas dari apapun penyebabnya. Sebaliknya, viktimologi pidana pada umumnya mendekati subjek dari perspektif kriminologis dan hukum, di mana ruang lingkup studi didefinisikan oleh hukum pidana.[[31]](#footnote-31) Arief Gosita mengemukakan objek studi atau ruang lingkup viktimologi yaitu:[[32]](#footnote-32)

1. Berbagai macam viktimasi kriminal atau kriminalistik.
2. Teori-teori etimologi viktimasi criminal.
3. Partisipan terlibat dalam terjadinya atau adanya viktimisasi kriminalseperti korban, pelaku, pengamat, legislator, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dll.
4. Reaksi terhadap suatu viktimasi criminal.
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian atau viktimologi, usaha-usahaprevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

### Perkembangan Viktimologi

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat memengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.[[33]](#footnote-33) Von Hentig telah membuka cakrawala baru yang lebih luas, bahwa dalam suatu peristiwa pidana seyogyanya dipandang ada interaksi yang bukan saja disebabkan oleh pelaku, akan tetapi terdapat keterkaitan antara pelaku dan korban meskipun ruang lingkup viktimologi masih dalam pentahapan sempit. Pada tahun 1947, Benjamin Mendelson, seorang pengacara di Jerussalem dianggap orang pertama kali mempergunakan istilah *victimology* dalam bukunya berjudul “*Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*”.[[34]](#footnote-34)

Setelah itu para sarjana-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “*de Criminaliteit van Oss, Gronigen*”, dan pada Tahun 1959 P. Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. sehinga pada Tahun 1977 didirikanlah *World Society of Victimology*. *World* *Society of Victimology* (WSV) dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bansa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Decleration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*.[[35]](#footnote-35)

## Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *straafbar feit* yang artinya peristiwa pidana, tindak pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat di hukum dan perbuatan pidana. Istilah ini terdapat dalam *weetbook* *van strafrecht* Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.[[36]](#footnote-36) Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.[[37]](#footnote-37)

Simons mengartikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangakan Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.[[38]](#footnote-38) Van Hamel menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.[[39]](#footnote-39)

Tindak Pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.[[40]](#footnote-40) S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).[[41]](#footnote-41)

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tindak pidana ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang.[[42]](#footnote-42) Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin :[[43]](#footnote-43)

*“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”*

*“tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.”*

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuanorang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[[44]](#footnote-44)

### Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi.[[45]](#footnote-45) Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:[[46]](#footnote-46)

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kitamenjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*)dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*)dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.[[47]](#footnote-47) Delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini:[[48]](#footnote-48)

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en over tredingen*).
2. Delik materiel dan delik formil (*mateniele en formelede licten*).
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*).
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*Zelfstandige en voorgezette delicten*).
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortduren de delicten*).
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequali-ficeerde delicten*).
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*Doleuse en culpose delicten*).
9. Delik politik dan delik komun atau umum (*Politieke En Commune Delicten*).
10. Delik propria dan delik komun atau umum (*Delicta Prop Ria En Commune Delicten*).
11. Delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, dan lain-lain.
12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi, dan lain-lain.

### Ruang Lingkup Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana Undang-Undang selalu ada objek hukum (disingkat objek). Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana Undang-Undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja. Dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana. Dalam hukum pidana tidak berpantang dengan perkecualian.[[49]](#footnote-49)

Tindak pidana dapat kita bedakan ke dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari kedua unsurtersebut adalah sebagai berikut:[[50]](#footnote-50)

1. Unsur Objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:
2. Melanggar hukum (wedenrechtelijkheid).
3. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagaipengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalamkejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
4. Unsur Subjektif aitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari:
5. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*).
6. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
7. Macam-macam maksud atauoogmerkseperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,pemalsuan dan lain sebagainya.
8. Perasaan takut atau *vress*.
9. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:[[51]](#footnote-51)

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikanpelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

## Tinjauan Umum tentang Scammer

### Pengertian Scammer

*Scam* merupakan salah satu bentuk kejahatan digital atau *cyber crime* yang harus kita ketahui supaya tidak hal negatif ini tidak tersebar dan tidak memakan korban lebih banyak lagi. *Scam* merupakan sebuah istilah yang menggambarkan tentang skema penipuan yang tidak lain untuk mendapatkan uang atau barang atau data pribadi dari korbannya. Seperti halnya masa teknologi modern, *scam* adalah salah satu upaya untuk mendapatkan sejumlah dana dan keuntungan sebesar mungkin bagi pelaku dengan melakukan suatu tindakan penipuan secara terorganisir.[[52]](#footnote-52) *Scam* adalah berita elektronik dalam internet yang membohongi dan bersifat menipu, sehingga pengirimnya akan mendapat manfaat dan keuntungan tertentu.[[53]](#footnote-53)

*Scammer* adalah seseorang atau sekelompok yang menipu atau memanfaatkan sesuatu dari orang lain dengan cara yang yang tidak baik. Mereka menipu lewat dunia maya, pelaku *scammer* bisa siapa saja orang-orang lokal maupun orang asing. Kurangnya pengetahuan teknologi informasi merupakan salah satu masalah yang dapat dijadikan sasaran oleh pelaku *scammer* untuk melakukan tindakan *scam*.[[54]](#footnote-54) *Scamming*, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan melakukan aksi penipuan baik menggunakan nama atau instansi yang mengatasnamakan orang lain.[[55]](#footnote-55)

*Scam* tindak kejahatan yang sangat sulit dikenali. Pasalnya, para *scammer* akan menyamar sebagai orang yang bisa mendapatkan kepercayaan Anda, sehingga Anda bisa lengah dan akhirnya akan menyebutkan detail informasi pribadi. Pada tahun 2020, tercatat ada 50.176 kasus penipuan dengan *scam* di dunia hingga kerugian mencapai $154.8 million. Kasus penipuan ini umumnya terjadi di toko *online*, agen *traveling* atau liburan, bahkan *romance* *scam*. [[56]](#footnote-56)

### Ruang Lingkup Scammer

Terdapat banyak sekali para pengguna internet yang mencari peluang melalui bisnis *online*, dan ini memberikan ide bagi para *scammer* (pelaku penipuan berbasis *online*) untuk meraup keuntungan.[[57]](#footnote-57) Biasanya aksi penipuan *scammer* ini berkedok penjualan suatu produk, penawaran hadiah, penipuan pinjaman, penawaran kerjasama yang menjanjikan keuntungan dan lain lain, sehingga calon korban percaya pada pelaku scammer dengan memberikan sejumlah uang dan informasi data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pelaku *scammer*, ciri-ciri *scam* berikut ini:[[58]](#footnote-58)

1. Mengaku dari instansi atau seseorang yang dikenal.

Para *scammer* akan menghubungi calon korbannya dengan berpura-pura sebagai suatu instansi ataupun seseorang yang dikenal. Dengan begitu, korban akan mudah dikelabui dan memasukkan data pribadi yang seharusnya tidak boleh dibagikan sembarangan.

1. Menginformasikan terdapat masalah ataupun menawarkan hadiah.

Setelah melakukan perkenalan, biasanya *scammer* akan menginfokan bahwa mereka menemukan masalah pada akun korban, atau sebaliknya, mereka menawarkan korban sebuah hadiah yang harus segera diklaim oleh korban. Cara ini dilakukan untuk mendapat data pribadi ataupun memperoleh sejumlah uang dari korban.

1. Memerlukan tindakan segera.

*Scammer* akan menyuruh korban untuk melakukan tindakan dengan segera apabila tidak ingin terjadi suatu masalah yang tidak dapat diatasi kedepannya. Biasanya pelaku akan menuntut korban untuk segera membayar sejumlah uang dengan waktu yang terbatas atau sesegera mungkin.

1. Memberikan arahan untuk melakukan pembayaran.

Untuk mendapatkan hadiah, biasanya pelaku meminta korban untuk melakukan pembayaran melalui transfer agar hadiah dapat dicairkan oleh korban.

Ada ribuan jenis *scam* saat ini, tetapi sebagian besar melibatkan pencurian uang, properti, atau informasi. Dibawah ini adalah beberapa jenis scam yang umum:[[59]](#footnote-59)

1. *Phishing*

*Phishing* melibatkan *scammer* atau dalam hal ini *phisher* yang menyamar sebagai organisasi yang sah atau orang terpercaya untuk meminta informasi pribadi yang sensitif seperti nomor akun, kredensial pengguna, atau data kartu kredit. Setelah itu, scammer akan menggunakan informasi ini untuk mencuri uang, melakukan penipuan identitas atau kartu kredit, terlibat spionase perusahaan, atau kegiatan terlarang lainnya. Mayoritas *phishing* dilakukan melalui email, tetapi taktik phishing SMS adalah ancaman yang harus diwaspadai.

1. *Dark Patterns*

*Dark patterns* adalah fitur antarmuka pengguna yang dirancang untuk mengelabui pengguna agar melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi perusahaan daripada pengguna atau pelanggan.

1. *Crowdsourcing*

Platform *crowdsourcing* seperti kitabisa dan *kickstarter* memungkinkan orang untuk meminta sumbangan dari siapapun di internet. Orang menggunakan *crowdsourcing* untuk mendanai penemuan, ide bisnis, biaya pengobatan, dan sebagainya. Scammers menyalahgunakan platform *crowdsourcing* dengan menyiapkan kampanye palsu yang dirancang untuk menarik audiens target mereka untuk mengumpulkan jumlah sumbangan yang cukup besar dan kemudian menghilang.

1. *Catfishing*

Biasanya dilakukan melalui *website* kencan, aplikasi kencan, atau media sosial. Ini melibatkan scammer yang membina hubungan jarak jauh. Penipu akan membuat profil yang meyakinkan, lengkap dengan foto dan informasi latar belakang tetapi semuanya palsu. Setelah hubungan menjadi lebih berkembang, *scammer* akan meminta uang biasanya untuk keadaan darurat seperti biaya medis atau hukum.

## Tinjauan Umum tentang Non-Fungible Token (NFT)

### Pengertian Non-Fungible Token (NFT)

NFT (*Non-Fungitable Token* ) adalah sebuah aset autentik di dunia digital yang memiliki keunikan, sehingga tidak memungkinkan NFT untuk ditukar atau setara satu sama lain dikatakan NFT merupakan sertifikat digital yang menyatakan pihak yang memiliki arsip digital seperti foto, perjanjian, akta, video, atau bentuk virtual lainnya. Ketika NFT sudah dienkripsi di *blockchain*, maka data tersebut tidak lagi bisa direplikasi atau diduplikasi. Pengertian lain, NFT memiliki sifat unik/autentik sehingga cocok untuk mengidentifikasi sesuatu atau seseorang dengan cara yang unik.[[60]](#footnote-60)

NFT sederhananya adalah sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar digital yang kita kenal sebagai *blockchain*. Sama seperti halnya mata uang digital seperti bitcoin, NFT berjalan pada platform blockchain. Bedanya, jika pada mata uang kripto seperti bitcoin, coin tersebut, yang sebenarnya adalah berupa kumpulan kode, dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat *non-fungible*. Yaitu tidak dapat dipecah layaknya koin . Karena pada NFT, kumpulan kode tersebut dapat di embed dengan arsip digital sehingga membuat kumpulan kode pada NFT menjadi unik satu dengan lainnya. Hal ini menjadi pembeda paling dasar antara NFT dengan mata uang kripto konvensional.[[61]](#footnote-61)

Rahman Desyanta menyatakan NFT merupakan token yang tidak bisa ditransaksikan dan memiliki nilai yang berbeda. Token yang merepresntasikan suatu benda yang memiliki nilai sendiri, bentuk token tersebut terdapat kode yang berisikan *smart contract* yang menyatakan barang ini milik kita. *Non-fungitable token* terdaftar di teknologi *blockchain*. Dan nilai dari NFT arts sangat subjektif, dan NFT memiliki pasarnya sendiri.[[62]](#footnote-62) NFT dapat berfungsi sebagai pembuktian kepemilikan dan keberadaan aset digital dalam bentuk karya seni, video, foto, hingga musik. Lebih lanjut, pembuat aset digital dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan di pasar NFT atau pertukaran secara *peer-to-peer*. Dengan menggunakan sistem *blockchain* untuk fungsi validasi dari keaslian suatu karya, NFT dapat menjadi solusi perindungan *Intellectual Property* (IP) yang menjanjikan. Akan tetapi pemanfaatan NFT secara global dalam kerangka mendukung ekonomi digital perlu mendapatkan perhatian khusus.[[63]](#footnote-63)

### Ruang Lingkup Non-Fungible Token (NFT)

NFT sudah ada sejak tahun 2014, kini semakin terkenal karena mereka dianggap sebagai metode yang praktis untuk membeli dan menjual karya seni digital. NFT juga umumnya dinilai sebagai salah satu dari proses transaksi yang sangat terbatasdan memiliki kode pengenal yang unik. NFT adalah bagian dari *blockchain*. Maka dari itu, pembeli NFT nantinya bisa memverifikasi bahwa ia merupakan pemilik tunggal dari aset yang ia beli.[[64]](#footnote-64) Apabila dilihat penggunaan NFT, tidak hanya digunakan selayaknya benda pada umumnya, namun dapat dijadikan investasi dapat diperjual belikan. Didalam dunia investasi NFT salah satunya diperdagangkan dalam bentuk digital. NFT yang dikategorikan sebagi aset Aset Kripto yang diperdangankan di bursa berjangka komoditi.[[65]](#footnote-65)

NFT ditransaksikan melalui sistem *blockchain*, yang merupakan buku yang mencatat semua transaksi di jaringan. *Blockchain* memungkinkan transmisi data rahasia melalui skema kriptografi. Untuk diperdagangkan, NFT biasanya melalui proses *casting*. Ini adalah proses mengubah file digital menjadi koleksi kriptografi. Proses ini melibatkan pembuatan blok baru, memvalidasi informasi, dan merekam ke *blockchain*. Proses *casting* berlangsung sebagai pihak ketiga di NFT *Marketplace*. Misalnya, OpenSea, Ribble, MakersPlace, ThetaDrop. Ketika aset digital menjadi NFT (*blockchain terenkripsi*), hanya pemilik asli yang dapat menggandakan file di dunia maya. NFT hanya dapat dimiliki oleh satu pemilik dalam satu waktu. Izin dikelola melalui ID unik dan metadata yang tidak dapat direplikasi oleh token lain. NFT dibentuk oleh kontrak pintar yang menetapkan kepemilikan dan mengelola transfer antar NFT. NFT diperdagangkan dan proses perdagangan tergantung pada platform yang dipilih. Beberapa hanya dapat digunakan dengan dolar dan Ethereum (ETH). Keunikan data NFT memungkinkan pemilik memverifikasi kepemilikan dan memfasilitasi transfer token antar pemilik. Dapat diibaratkan seperti lukisan asli Monalisa karya Leonardo da Vinci. Meski replikanya ada banyak, tapi yang asli hanya ada satu di dunia. Nilai obyektifnya mungkin sama antara lukisan orisinal dengan replikanya, tapi ada nilai subyektif yang membedakan keduanya.[[66]](#footnote-66)

Suatu NFT atau karya digital yang dijual akan memiliki nomor kode dan juga metadata yang unik yang tidak dapat dilakukan replikasi sehingga antar NFT akan memiliki perbedaannya masing-masing. Dalam kode unik tersebut di dalamnya terdapat informasi mengenai penerbit token, pemilik awal, dan pemilik akhir atas suatu karya digital yang diperjualbelikan. Karena sifatnya yang privat tidak dapat direplikasi, menjadikan NFT masuk kategori barang yang langka dan menjadikannya barang digital yang berharga yang dapat diasumsikan sama halnya dengan asset kepemilikan di dunia nyata.[[67]](#footnote-67) Karakteristik utama dari NFT meliputi namun tidak terbatas pada hal dibawah ini:[[68]](#footnote-68)

1. Unik (*Unique*)

NFT dapat digunakan untuk membuat aset digital yang

unik, sehingga tidak ada NFT yang sama dan setiap Token

NFT terbukti unik serta terekam pada jaringan blockchain.

1. Dapat dilacak (*Traceable*)

Kepemilikan, sumber, dan pergerakan setiap NFT terlihat

pada jaringan *blockchain* yang dapat memberikan

gambaran NFT yang transparan dan dapat dilacak secara

*real-time*.

1. Diautentikasi (*Authenticated*)

NFT tidak dapat dipalsukan atau direplikasi. Setiap Token

didukung oleh buku besar (*ledger*) digital yang tidak dapat

diubah dan jaringan terdesentralisasi (*blockchain*), yang

memungkinkan token untuk diautentikasi.

1. Dapat beradaptasi (*Adaptable*)

NFT sangat mudah beradaptasi dengan ekosistem digital

pada dunia *metaverse* yang mendukung penggunaan dan

aplikasi NFT. Pemain dapat membeli dan

memperdagangkan NFT di berbagai NFT *market place*

*platform*.

Dari katakteristik NFT ini muncul suatu nilai yang menjadikan harga dari NFT menjadi tinggi ataupun rendah. Chambers merumuskan ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai potensi dari suatu aset NFT yang sudah umum, yaitu NFT *value* = *Utility* + *Ownership* *History* + *Rarity*. *Utility*, yaitu melihat bagaimana NFT dapat digunakan baik di dunia nyata maupun dunia maya. *Ownership* *History*,dimana nilai NFT ditentukan oleh pemilik sebelumnya, misalnya suatu selebriti, bintang film, atau perusahaan tertentu, maka harga dari suatu NFT akan melonjak dan lebih besar daripada NFT lainnya. Kemudian, *Rarity*, yakni kelangkaan yang dipengaruhi dengan keunikan khususnya daripada yang lainnya. Walaupun, Chamber mengatakan bahwa walaupun rumus ini bisa digunakan secara umum untuk mengukur nilai NFT, tetapi dikarenakan setiap NFT mempunyai keunikan tersendiri, maka setiap variabelnya dapat berbeda tergantung kepada jenis NFT yang akan dinilai.[[69]](#footnote-69)

1. Isabelle Lee, “The NFT Space Is Booming Again, but Experts Say There Are 5 Challenges the Digital Collectibles Space Still Needs to Overcome,” Business Insider India, 2021. Diakses melalui https://www.businessinsider.nl/the-nft-space-is-booming-again-but-experts-say-there-are-5-challenges-the-digital-collectibles-space-still-needs-to-overcome/, pada 17 Desember 2024. [↑](#footnote-ref-1)
2. Angel Tng, Hari Sutra Disemadi, “Investasi dan Transaksidi Marketplace Non–Fungible Token: Peluang dan Risiko Hukum”, *Halu Oleo Law Review*, 7 (1), 2023:133. http://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/17/17. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Bandung: Alumni, 2018:27. [↑](#footnote-ref-3)
4. Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013:17. [↑](#footnote-ref-4)
5. Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa: Jakarta, 2012:4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Radya Dzuhrizha Rahmana, Adhitya Widya Kartika, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)”, *Risalah Hukum*, 18 (2), 2022:84. https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/918/247. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19 (1), 2019:34. https://www.academia.edu/download/86005712/pdf\_1.pdf. [↑](#footnote-ref-7)
8. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008:77. [↑](#footnote-ref-8)
9. Iqra Anugrah, *et.al.*, “Case Report: Viktimologi dalam Perspektif Medikolegal”, *Fakumi Medical Journal*, 4 (7), 2024:557. http://103.133.36.76/index.php/fmj/article/view/480/316. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Subhan, Nabila Ihza Nur Muttaqi, “Perlindungan Hukum Bagi KorbanPenyebaran Data Pribadi Oleh PenyediaJasa Pinjaman OnlineIllegaldalam Perspektif Viktimologi”, *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2 (1), 2024:38. http://delicti.fhuk.unand.ac.id/index.php/jdc/article/view/35/25. [↑](#footnote-ref-10)
11. Robertus Nugroho Perwiro Atmojo, Fokky Fuad “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia”. *Jurnal Hukum Tora,* 9 (2), 2023. https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/260 [↑](#footnote-ref-11)
12. Edwin Putraga, “Modus Operandi Dan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Penipuan Berkedok Investasi Yang Dilakukan Melalui Aplikasi Online Di Polda DIY” *Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023*. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/46457/19410362.pdf?sequence=1&isAllowed=y [↑](#footnote-ref-12)
13. Arna Safitri, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten NFT (Non- Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2022*. https://repository.unja.ac.id/40961/. [↑](#footnote-ref-13)
14. Achmad Irwan Hamzani, Soesi Idayanti, Tiyas Vika Widyastuti, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023, hlm.2-3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990:130 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2020:138. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010:153. [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm.104 [↑](#footnote-ref-18)
19. Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Depok: Rajagrafindo, 2019, hlm.71. [↑](#footnote-ref-19)
20. Okamaisya Sugiyanto, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Preskpektif Viktimologi”, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2 (1), 2021:24. https://journal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2240/635. [↑](#footnote-ref-20)
21. Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi*, Jakarta: Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024:3. [↑](#footnote-ref-21)
22. Alice Auxiliadora Marques Cabral, Ruddy Watulingas, Harly S. Muaja, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur”, *Lex Privatum*, 10 (5), 2022:4. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42832. [↑](#footnote-ref-22)
23. G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014:2. [↑](#footnote-ref-23)
24. Tasya Nafisatul Hasan, Marli Candra, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2 (2), 2021:90. https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13026/11943. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kori Hermawanti, *et.al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi”, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2), 2022:41. https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/4687/2379. [↑](#footnote-ref-25)
26. Raden Muhammad Arvy Ilyasa, “Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia”, *IPMHI LAW JOURNAL*, 2 (1), 2022:37. https://journal.unnes.ac.id/sju/ipmhi/article/view/53748/21179. [↑](#footnote-ref-26)
27. Yurista Ardien Adhipradana,Wiwik Afifah, “Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial”, *Bureaucracy Journal*, 3 (2), 2023:1539. https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/264/29. [↑](#footnote-ref-27)
28. Rahmat Hi Abdullah, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, *Jurnal Yustika*, 22 (1), 2019:57. https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/1958/1817. [↑](#footnote-ref-28)
29. Isabella Dewi Fortuna, “Protection of Victims of Fraud Crime in Victimological Studies”, *Jurnal Scientia Indonesia*, 4 (1), 2018:207. https://journal.unnes.ac.id/nju/jsi/article/view/36049/14222. [↑](#footnote-ref-29)
30. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022:2. [↑](#footnote-ref-30)
31. Amira Paripurna, *et.al*, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2021:6. [↑](#footnote-ref-31)
32. Mihael Sianturi, Muhammad Nazri, Ayu Efrita Dewi, “Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana PencurianKendaraan Di Tanjungpinang Kepulauan Riau”, DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum, 10 (1), 2022:97. https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/view/202/49. [↑](#footnote-ref-32)
33. Joice Soraya, *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022:3. [↑](#footnote-ref-33)
34. Alfies Sihombing , Yeni Nuraeni, “Korban Perkosaan Ditinjau Dari Viktimologi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan”, *PAJOUL (Pakuan Justice journal Of Law)*, 3 (2), 2022:15. https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/download/7654/3861. [↑](#footnote-ref-34)
35. Yudi Krismen, “Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana”, *Sisi* *Lain Realita*, 1 (1), 2016:46. https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/1406. [↑](#footnote-ref-35)
36. Fariaman Laia , Yonathan Sebastian Laowo, “Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan”, *Jurnal Panah Keadilan*, 1 (2), 2019:84. https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php /PanahKeadilan/article/view/455/379. [↑](#footnote-ref-36)
37. Rianda Prima Putri, “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Ensiklopedia Social Review*, 1 (2), 2019:131. https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/229/213. [↑](#footnote-ref-37)
38. Fariaman laia, “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Jabatan“, *Jurnal Panah Keadilan*, 1 (2), 2022:7. https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/448/374. [↑](#footnote-ref-38)
39. Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting, Anggara Zuhri Harahap, “Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3 (2), 2021:229. https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1179. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ida Bagus Anggapurana Pidada, *et.al*, Tindak Pidana Dalam KUHP, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022:42. [↑](#footnote-ref-40)
41. Eki Sirojul Baehaqi, “Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana”, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1 (1), 2022:5. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3262168&val=28597&title=KETURUTSERTAAN%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA. [↑](#footnote-ref-41)
42. Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2022:19 [↑](#footnote-ref-42)
43. I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (3), 2021:357. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/4542. [↑](#footnote-ref-43)
44. Fariaman laia, “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan”, *Jurnal Panah Keadilan*, 1 (2), 2022:7. https://jurnal.uniraya.ac.id /index.php/PanahKeadilan/article/view/448/374 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal LEGALITAS*, 5 (2), 2020:93. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/5112/5267#. [↑](#footnote-ref-45)
46. Arhjayati Rahim, “Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge’ Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Al-Himayah*, 3 (1), 2019:36. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881/660. [↑](#footnote-ref-46)
47. Sry wahyuni, Elwidarifa Marwenny, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)”, *UIRLawReview*, 4 (2), 2020:53-54. https://journal.uir.ac.id/index.php /uirlawreview/article/view/6468/3270. [↑](#footnote-ref-47)
48. Indah Sari, “Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10 (1), 2019:71-72. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/404/374. [↑](#footnote-ref-48)
49. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2022:1. [↑](#footnote-ref-49)
50. Khoirul Anam, “Tindak Pidana Dilakukan Oleh“Premanisme””, *Yustitiabelen*, 4 (1), 2018:12-13. https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/150. [↑](#footnote-ref-50)
51. Muhammad Ramadan Kiro, Muhamad Saktiawan, “Penerapan Delik Kohabotasi Dalam Kuhp Nasional Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana”, *DELAREV*, 3 (1), 2024:550. http://delarev.com/index.php/go/article/view/72. [↑](#footnote-ref-51)
52. Amira K, “Scam Adalah: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Cara Menghindarinya”, *Gramedia Literasi,* Diakses melalui https://gramedia.com/literasi/scam/, Pada 28 November 2024, Pukul 16.00 WIB. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ely Nuryani, Yul hendra, Irma Yunita Ruhiawati, “Penyuluhan Dan Pelatihan Internet Sehat Untuk Anak Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) Padakelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang”, *Jurnal ABDIKARYA*, 3 (1), 2021:82. https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/1262/784. [↑](#footnote-ref-53)
54. Muhamad Sultan, *et.al*, “Penyuluhan Pencegahan Tindakan Scam Pada Teknologi

    Bersama Masyarakat Durensari Bojongsari Depok”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika*, 2 (3), 2021:487. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JATIMIKA/article/view/14325/9305. [↑](#footnote-ref-54)
55. Muhammad Alhadi Murizqy, Rianda Dirkareshza, “Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency”, *Jurnal Ius Constituendum*, 7 (2), 2022:282. https://www.researchgate.net/profile/Rianda-Dirkareshza/publication/364556628\_Peninjauan\_Aspek\_Keamanan\_Dan\_Perlindungan\_Hukum\_Terhadap\_Investor\_Crpytocurrency/links/6364727e431b1f53006b02b1/Peninjauan-Aspek-Keamanan-Dan-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Investor-Crpytocurrency.pdf. [↑](#footnote-ref-55)
56. Bernadetta Azalia, “Apa Itu Scam? Jenis, Cara Kerja, hingga Tips Menghindarinya”, Diakses melalui https://blog.rumahweb.com/scam-adalah/, Pada 28 November 2024, Pukul 15.23 WIB. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ray Pratama Siadari, “Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana”, Diakses melalui https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-danunsur-unsur-tindak.html?m=1, Pada 28 November 2024, Pukul 16.37 WIB. [↑](#footnote-ref-57)
58. Muhammad Faniawan Asriansyah, “Bahaya Kejahatan Scam”, Diakses melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/16202/Bahaya-Kejahatan-Scam.html, Pada 28 November 2024, Pukul 19.08 WIB. [↑](#footnote-ref-58)
59. Hiqbal Fauzi, “Apa Itu Scam? Jenis, Cara Kerja, Hingga Tips Menghindarinya”, Diakses melalui https://nevacloud.com/blog/apa-itu-scam/, Pada 28 November 2024, Pukul 19.45 WIB. [↑](#footnote-ref-59)
60. Achmad Fachmi, Nina Mayesti, “Tinjauan literatur argumentatif tentang kepemilikan data arsip digital non-fungible token ( NFT) pada teknologi blockchain”, *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 18 (1), 2022:148. https://journal.ugm.ac.id/v3/BIP/article/view/3989/1693. [↑](#footnote-ref-60)
61. Hisny Fajrussalam, et.al, “Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital”, *As -SABIQUN Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4 (1), 2022:154. https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/assabiqun/article/view/1688/1180. [↑](#footnote-ref-61)
62. William Torbeni, Ni Putu Emilika Budi Lestari, I Komang Angga Maha Putra, “Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital”, *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 5 (1), 2022:345. https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/656/424. [↑](#footnote-ref-62)
63. Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli, “Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital”, *Jurnal Fundamental Justice* , 3 (1), 2022:3. https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/1736. [↑](#footnote-ref-63)
64. Raden Ifan Syah Fadillah, “Transaksi Komunikasi Yang Terjadi Di Dalam Non Fungible Token ( NFT ) Melalui Media Platform Opensea”, *Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik* *(KONASPOL)*, 1 (1), 2023:490. https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/prosiding-konaspol/article/view/2393/689. [↑](#footnote-ref-64)
65. Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu, et.al, “Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual”, *JURNAL RECTUM*, 5 (1), 2023:1242. https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2962/2677. [↑](#footnote-ref-65)
66. Teti Tiran, “Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (3), 2022:6011. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3035271&. [↑](#footnote-ref-66)
67. Samuel M.P. Hutabarat, “Peran Hukum Nasional Atas Kepemilikan Terhadap Aset

    Digital Non – Fungible Token (NFT)”, *Gloria Justitia*, 3 (1), 2023:48. https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/gloriajustitia/article/download/4422/2055. [↑](#footnote-ref-67)
68. Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin, *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*, Jakarta: ndonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2022:16-17. [↑](#footnote-ref-68)
69. M. Labib Fahmi Arif, H. Hendri Tanjung, Hj. Qurroh Ayuniyyah, “Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5 (4), 2022:1769. https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1981. [↑](#footnote-ref-69)